



Pemerintah Kota Balikpapan

2025

LKJIP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya semoga laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Balikpapan, Februari 2026
**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi **Indikator kinerja** dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran I Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan

Politik di Daerah.

Sasaran I memiliki indikator Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dengan realisasi capaian Indikator mencapai **100 %** atau predikat **“Sesuai Target”**.

2. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan Sasaran II dengan indikator kinerja Persentase Konflik Sosial Yang Tertangan dengan realisasi capaian Indikator mencapai **112,36%** atau predikat **“Melebihi Target”**;
3. Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah **92.86%** atau predikat **“Tidak Tercapai”**

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan sub Kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp 30.909.230.510,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp 26.996.712.123,25 atau mencapai **87,34%**. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja anggaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja anggaran tahun 2025 adalah **Tinggi**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	4
1.4.1 Tugas dan Fungsi	4
1.4.2 Struktur Organisasi	11
1.4.3 Sumber Daya Manusia	12
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	15
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Strategis	20
2.2 Indikator Kinerja Utama	53
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	100
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	100
3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100
3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	101
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	103



3.2.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	104
3.2.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	109
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	117
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	120
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	122
3.2.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	130
3.2.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	146
3.3	Realisasi Anggaran.....	155
BAB IV PERENCANAAN KINERJA.....		165
4.1	Kesimpulan	165
4.2	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	166



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.....	12
Gambar 3.2 Rapat Rapat Internal Monitoring Capaian Kinerja.....	140
Gambar 3.3 Apel Rutin Pegawai.....	140
Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Bela Negara.....	142
Gambar 3.5 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.....	143
Gambar 3.6 Bimtek Kewaspadaan Dini.....	144
Gambar 3.7 Monitoring Kondusifitas Daerah.....	144
Gambar 3.8 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.....	145
Gambar 3.9 Pembinaan Ormas.....	145



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	144
--	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026	22
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 – 2026	534
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	62
Tabel 2. 4 Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2024	54
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.....	58
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025.....	62
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	63
Tabel 2.8 PK Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	65
Tabel 2.9 Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025.....	67
Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.....	100
Tabel 3.2 Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja	102
Tabel 3.3 Predikat Capaian Kinerja	104
Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan	105
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.....	107
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capain Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	110



Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	115
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026/ Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 .	117
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)/ Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)*	120
Tabel 3.10 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	123
Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	131
Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aparatur.....	146
Tabel 3.13 Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Golongan dan Pendidikan	147
Tabel 3. 14 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	149
Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	152
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.....	155



DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025;
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/ SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026;
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81);
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025 (bila ada);
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025;

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Wali Kota Balikpapan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LAKIP yang disusun dan dilaporkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2025 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2025, yang merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Wali Kota Balikpapan tahun 2025, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dimaksudkan untuk melaporkan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil capaian kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
2. Untuk memberikan informasi/penjelasan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) dalam rangka menyajikan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya

1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragam, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan polititik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum.
3. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - a. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - b. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a. Subbidang Politik Dalam Negeri
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Badan sesuai pasal 4 mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 5 sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

- dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan, pembinaan pelayanan publik, kearsipan, surat menyurat dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;

- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen system akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
- k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi

penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a) melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1) rencana strategis;
 - 2) rencana kerja;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) penetapan kinerja; dan
 - 5) laporan kinerja;
- b) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d) melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e) mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f) melaksanakan pengamanan perangkat keras maupun perangkat lunak terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g) melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h) melaksanakan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Perangkat Daerah dan website Pemerintah Daerah;
- i) menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;

- j) mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- k) melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- l) menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- m) mengoordinir dan meneliti anggaran;
- n) menyusun laporan keuangan Dinas;
- o) melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- o. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- p. menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- q. memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

1.4.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana pemerintah kota Balikpapan dengan dasar Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan per 31 Desember 2025 memiliki sumber daya manusia sebanyak 31 orang, terdiri dari PNS 20 orang, PPPK 7 orang dan PPPK Paruh waktu 1 orang. Adapun komposisi pegawai PNS menurut jenjang pendidikan menunjukkan bahwa



sumber daya aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dapat dikatakan cukup baik dari segi pendidikan.komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel berikut:



Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan	Golongan						Sub Total	Pendidikan						Sub Total	Jenis Kelamin	
	XI	VII	IV	III	II	I		S-2	S-1	D3/ D4	SLTA	SLTP	SD		L	P
Kepala Dinas			1				1	1						1	1	
Sekretaris Dinas			1				1	1						1	1	
Kepala Bidang			1				1		1					1	1	
Kepala Sub Bagian				5			5	1	3	1				5	3	2
Analisis				3			3		3					3	2	1
Staff				3	5		8				8			8	3	5
Staff (PPPK)							0							0		
Jumlah PNS/CPNS	0	0	3	11	5	0	19	3	7	1	8	0	0	19	11	8
THL							0				1			1		1
Tenaga Bantu							0				5	1		6	5	1
Jumlah Non PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7	5	2
TOTAL SDM																
(PNS/PPPK + Non PNS)			26													

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pengamatan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sangat terbatas dalam jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan harus dibantu oleh tenaga Non PNS (Tenaga Bantuan). Dimana jumlah Pegawai Non PNS mendominasi dengan jumlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang atau 58% dari total pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sedang Status PNS sebanyak 20 (dua puluh) orang atau hanya 38% dari jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah yaitu pada fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam hal perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana fungsi Badan Kesbangpol tersebut berperan dalam mendukung tercapainya visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” khususnya pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menumbuhkan Nasionalisme atau rasa cinta tanah air terhadap penduduk Kota Balikpapan khususnya kalangan pelajar di Kota Balikpapan yang didalam praktiknya akan membantu meningkatkan kesadaran dalam membina kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Balikpapan sehingga terciptanya situasi kondusif yang mendukung Kota Balikpapan menjadi Kota yang nyaman dihuni;
- 2) Fungsi kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang dituangkan dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial juga memiliki peran dalam menciptakan Balikpapan sebagai Kota Yang Nyaman Dihuni. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan untuk mewujudkan prinsip Kota Layak Huni yaitu pada keamanan dan dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di Kota Balikpapan. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara maksimal;
- 3) Untuk merespon aspek strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang berwawasan lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas Perangkat Daerah di Kota Balikpapan yaitu Indeks Liveable City atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Dengan sasaran yang akan di lakukan antara lain:
 - 4) Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup;
 - 5) Meningkatkan kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota;
 - 6) Sehingga terwujudnya Kota yang aman, tertib dan ramah lingkungan agar menjadi Lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan;

- 7) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan untuk mewujudkan prinsip-prinsip Kota Layak Huni tersebut yaitu pada Keamanan dan Dukungan fungsi ekonomi, sosial dan budaya di Kota Balikpapan yang diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, seminar dan forum diskusi, serta fasilitasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik. Upaya penanganan konflik sosial oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan melalui Tindakan penanganan konflik baik dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, maupun pemulihan pasca konflik yang melibatkan semua komponen masyarakat dan secara bersama-sama melakukan upaya penanganan konflik;
- 8) Dalam penanganan konflik, pemerintah mengakui peran pranata adat dan pranata sosial yang ada, sehingga perlu dilakukan upaya untuk pemberdayaan perangkat-perangkat tersebut dalam hal peningkatan Langkah-langkah penangananan konflik. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna akan menghasilkan konflik. Keberagaman budaya akan berpotensi memicu konflik sosial yang akan terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kewaspadaan nasional perlu dibentuk dengan didasari nilai-nilai dan semangat Nasionalisme;
- 9) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam penanganan konflik sosial dan kewaspadaan nasional khususnya di wilayah Kota Balikpapan, semua tugas pokok dan fungsi akan dilaksanakan dengan program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan dalam lima tahun demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur;
- 10) Beberapa hal yang menjadi permasalahan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam mencapai secara maksimal tujuan dari organisasi dan meningkatkan kinerja adalah keterbatasan pada Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil

Analisa kebutuhan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada Tahun 2025 idealnya memiliki jumlah pegawai sebanyak 65 pegawai, sedangkan pada kondisi sebenarnya dilapangan, jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota hanya sebanyak 31 orang;

- 11) Selain itu, kondisi tipe kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian kinerja organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan masih berada pada Tipe C, dimana tugas-tugas yang diemban oleh Badan Kesbangpol masih diampu oleh Dua bidang saja, sehingga masih belum maksimal dalam mengakomodir kebutuhan organisasi untuk mencapai target kinerjanya. Evaluasi kelembagaan telah dilakukan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada Tahun 2022. Dari skor yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memenuhi syarat untuk naik tipe;
- 12) kelembagaan menjadi Tipe B. Sarana dan prasarana Gedung Kantor yang belum diperbaiki.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan ;

Meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kerja ;

Meliputi Peencanaan Strategis yang berisi Visi, misi, tujuan dan sasaran, Program, kegiatan dan Perjanjian Kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan,

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

Meliputi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya, Capaian Kinerja Organisasi, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun lalu , Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/Lainnya, Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja), Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Realisasi Anggaran tahun 2025.

Bab IV: Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2021-2026.

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan mempunyai perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan kinerja Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 sebagai tahun perencanaan sebelumnya dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen restra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern Dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi : Ke 4 pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan”.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu ditetapkan dalam Rencana Strategis

didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam urusan pelayanan publik.

“Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota”

Tujuan, sasaran dan target dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,80	0,82	0,85	0,86	0,88
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27	28	28	29	30

		Meningkatnya pembangunan demokrasi dan politik di daerah	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	67	80	100	100	100
		Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	80	83	88	89	89

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sebagai tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi : “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi : Ke 4 pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah “Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua”.



Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) (Angka)	0,60	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55
	Meningkatnya Penyelesaian Potesnsi Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Telah Diselesaikan (%)	79	80	80	82	84	86
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,64	65,69	66,5	67,4	68,3	69,2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,86	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	0,56			
Meningkatkannya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	89	Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Telah Diselesaikan	80	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
								Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
								Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
								Pembentukan Paskibraka
								Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
						PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
						KEMASYARAKATAN	Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
								Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
						SOSIAL, DAN BUDAYA	Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
								Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penghayat Kepercayaan di Daerah
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
						KONFLIK SOSIAL		Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
								Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penanganan Konflik di Daerah
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penanganan Konflik di Daerah
								Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Kendaraan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan								

2.2 Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan terdapat perubahan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan No. 188.4/894/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 188.46-12/2022 Tentang Indikator Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Politik Kepada Masyarakat	Menggambarkan sejauh mana Badan Kesbangpol mampu meningkatkan peran lembaga politik dalam berpartisipasi terhadap pemberian pendidikan politik kepada masyarakat	(Jumlah lembaga politik yang melaksanakan pendidikan politik/Jumlah lembaga politik yang ada) x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Data dari Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	Menggambarkan sejauh mana Badan Kesbangpol mampu menindaklanjuti konflik	(Jumlah konflik yang ditindaklanjuti / jumlah laporan	Bidang Kesatuan Bangsa	Laporan Pelaksanaan Monitoring Sub Bidang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			berdasarkan laporan yang diterima	konflik yang diterima) x 100%		Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Hasil Pengukuran/Penilaian pada Rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alt, dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan	Total nilai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri	Hasil Penilaian dari Inspektorat Kota Balikpapan	Sekretaris Badan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah	Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI No. 88 tahun 2021 tenenag Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insptansi Pemerintah		

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode 2025-2029 tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Nomor: 0007.11/07/II/Kesbangpol/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	Menggambarkan tingkat intensitas potensi konflik di suatu wilayah, dinyatakan per 10.000 penduduk	(Jumlah potensi konflik yang terjadi / Jumlah penduduk) x 10.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Kepala Badan
2	Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang	Menggambarkan tingkat penyelesaian potensi konflik	(Jumlah potensi konflik yang diselesaikan / jumlah informasi potensi konflik yang diterima) x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Kepala Badan



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		telah Diselesaikan	sosial yang berhasil ditangani dibandingkan dengan seluruh informasi atau laporan potensi konflik yang masuk.	<i>Nilai Evaluasi AKIP = Komponen Perencanaan Kinerja (30%)+ Komponen Pengukuran Kinerja (30%) +Komponen Pelaporan Kinerja (25%)+ Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</i> (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan		
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan		diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan	Kepala Badan



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Instansi Pemerintah		suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan		oleh inspektorat daerah	



No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.			

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Wali Kota Balikpapan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan target kinerja dalam Tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Poin	68
2	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	Persen	100
3	Meningkatnya Pencegahan Konflik	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	89

	Sosial di Kota Balikpapan			
--	------------------------------	--	--	--

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Adanya tuntutan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan adanya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program, kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, maka pada tahun 2025 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan melakukan perubahan Perjanjian Kinerja. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Nilai	64,93	68
2	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan	Persen	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
		Pendidikan Politik Kepada Masyarakat			
3	Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

**Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial/ (per 10.000 Penduduk)	Angka	0,60	0,57
1.1	Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan	%	79	80
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,93	68

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran

yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp34.327.824.942,00. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar 30.909.230.510,00 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2. 9 Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.668.265.168	APBD-P
2				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.990.000	APBD-P
3				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.990.000	APBD-P
4				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.640.380.196	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
5				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.640.380.196	APBD-P
6				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 46.444.000	APBD-P
7				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 46.444.000	APBD-P
8				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.308.574.366	APBD-P
9				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 252.960.751	APBD-P
10				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 568.399.330	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
11				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 108.543.885	APBD-P
12				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 12.538.500	APBD-P
13				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 65.131.900	APBD-P
14				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 301.000.000	APBD-P
15				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 156.000.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
16				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 156.000.000	APBD-P
17				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.201.135.596	APBD-P
18				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 291.164.896	APBD-P
19				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 909.970.700	APBD-P
20				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.305.741.010	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
21				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 565.889.150	APBD-P
22				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 365.256.860	APBD-P
23				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 75.993.000	APBD-P
24				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Rp 298.602.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
25	Meningkatnya pembangunan demokrasi dan politik di daerah	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 7.168.415.032	APBD-P
26				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi	Rp 7.168.415.032	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
27				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 24.790.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
28				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 786.511.500	APBD-P
29				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 1.290.568.676	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
30				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 185.120.000	APBD-P
31				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan	Rp 1.318.600.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		
32				Pembentukan Paskibraka	Rp 3.063.952.856	APBD-P
33				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp 498.872.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
34				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 5.013.834.715	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
35				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 5.013.834.715	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
36				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 25.109.258	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
37				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 2.948.727.482	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
38				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 463.055.440	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
39				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 214.195.750	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
40				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 1.362.746.785	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
41				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 847.331.680	APBD-P
42				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 847.331.680	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
43				Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 14.800.000	APBD-P
44				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Rp 214.800.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
45				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 252.829.760	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
46				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 177.218.720	APBD-P
47				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Rp 187.683.200	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
48	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 2.097.456.690	APBD-P
49				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 2.097.456.690	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
50				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 21.876.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
51				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 938.270.850	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
52				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 216.776.740	APBD-P
53				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Rp 556.300.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
54				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 364.233.100	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
55				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 6.113.927.225	APBD-P
56				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 6.113.927.225	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
57				Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 50.000.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
58				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 2.574.811.875	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
59				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 1.061.355.350	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
60				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 264.260.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
61				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 349.500.000	APBD-P



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
62				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.814.000.000	APBD-P
Jumlah					Rp 30.909.230.510	APBD-P

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2025
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,91
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,04
3	Pelaporan Kinerja	15%	8,86
4	Evaluasi Kinerja	25%	12,15
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	65,96
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Balikpapan

3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Nomor : 700/096/IRBAN-I/ITKOT tanggal 19 Mei 2025 telah diberikan arahan perbaikan oleh Tim Evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2 Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja

N O.	KOMPO NEN	SARAN/ REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Agar OPD memperbaiki pohon kinerja yang telah ada guna mendukung pencapaian kerja organisasi	Pohon kinerja telah diperbaiki sesuai arahan guna mendukung pencapaian kerja organisasi dan telah dipublikasikan pada website kesbangpol dengan bukti dukung pada link berikut https://kesbangpol.balikpapan.go.id/pohon-kerja/
2	Pengukuran Kinerja	Agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai	Telah dilaksanakan survey pemahaman dan komitmen kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Balikpapan untuk mengetahui komitmen dan pemahaman setiap pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi dengan bukti dukung pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1Qk3purg2SgM0Cu6NcnYfgd-Uz7tYImm?usp=drive_link

N O.	KOMPO NEN	SARAN/ REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
		kinerja yang telah direncanakan	
3	Pelaporan Kinerja	Agar dokumen Laporan Kinerja segera dipublikasi di website OPD	Laporan Kinerja Badan Kesbangpol telah dipublikasikan pada website OPD dengan bukti dukung pada link berikut https://kesbangpol.balikpapan.go.id/laporan-kinerja-badan-kesbangpol-2024/
4	Evaluasi Kinerja	Agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi dan melengkapi simpulan keberhasilan dan kegagalan, hasil evaluasi rencana	Rencana aksi yang disusun telah dilengkapi dengan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan bukti dukung pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1Qk3purg2SgM0Cu6NcnYfgd-Uz7tYImm?usp=drive_link

N O.	KOMPO NEN	SARAN/ REKOMEN DASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
		aksi perlu dilengkapi dengan evidence atas tindak lanjut atas rekomendasi	

Sumber :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis. Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja

N o	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	100	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai

N o	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
			dengan yang direncanakan
3	>100	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Kota Balikpapan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 dan juga sebagai tahun pertama pelaksanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Sehingga pada subbag ini akan disajikan Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan dua dokumen perencanaan tersebut diatas. Sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan.

Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get 202 5	Realis asi 2025	Capai an (%)	Predik at
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*1 00	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Poin	68	65,96	97	Tidak tercapai
2	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	Persen	100	100	100	Terca pai
3	Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	100	100	100	Terca pai

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana 2 (dua) indikator mencapai

target 100% dan 1 (satu) indikator mencapai 97% dari target yang ditetapkan.

Sasaran pertama dengan indikator kinerja nilai SAKIP memiliki capaian kinerja 97%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas perangkat daerah berada pada kategori baik. Belum tercapainya target kinerja tersebut secara optimal disebabkan karena belum optimalnya implementasi AKIP yang diterapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dibuktikan dengan rekomendasi dari Inspektorat yang didalamnya merekomendasikan untuk melakukan perbaikan pada beberapa hal, yaitu dokumen pohon kinerja, pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai untuk mencapai kinerja yang direncanakan, publikasi pada laporan kinerja, dan pemantauan berkala terhadap rencana aksi untuk mendapatkan informasi yang akurat untuk menindaklanjuti hambatan dan tantangan dalam pencapaian kinerja. Secara substansi, capaian 97% menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Sasaran kedua dengan indikator Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat menunjukkan capaian 100%. Tercapainya target kinerja pada sasaran ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga politik yang menjadi sasaran pembinaan dan fasilitasi telah berpartisipasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan:

1. Efektivitas koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
2. Optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan politik;
3. Tingginya komitmen lembaga politik dalam mendukung pembangunan demokrasi di daerah.

Sasaran ketiga dengan indikator yang digunakan adalah Persentase Konflik Sosial yang Tertangani menunjukkan capaian 100%, yang menggambarkan bahwa seluruh konflik sosial yang terjadi selama Tahun 2025 dapat ditangani secara cepat dan tepat sehingga mampu menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Keberhasilan pencapaian dari target kinerja ini didukung oleh :

1. Sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif;
2. Respons cepat terhadap potensi konflik;
3. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.

Sedang untuk capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No .	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	6	6	$\frac{7}{6} \times 100$	8
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial/ (per 10.000 Penduduk)	Angka	0,57	0,57	100	Tercapai

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	6	6	7= 6/7*100	8
1.1	Meningkatnya Penyelesaian Potensi konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang telah Diselesaikan	%	80	100	125	Tercapai
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	65,96	97	Tidak Tercapai

Sumber:Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2025 dari ketiga indikator pada dokumen perencanaan tahun 2025-2029 mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 99%**, sedang untuk periode dokumen terbaru 2025-2029 **rata-rata keberhasilan sebesar 98.52%**, maka dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan sudah baik namun tetap melakukan peningkatan dikedepannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan baik pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 maupun tahun 2025-2029.



3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan masa transisi antara Dokumen Renstra Tahun 2021–2026 dan Renstra Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024, **mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026** yang telah ditetapkan. Adapun rincian realisasi dan capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Poin	-	-	-	-	60,46	95,00 %	64,92	99,88 %	65,96	97,00 %
	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada	Persen	-	-	;	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Masyarakat											
	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	-	-	81,00	101,00%	85,00	102,40%	100,00	113,64%	100,00	100,00%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum ditetapkan sebagai indikator pada sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan. Sasaran pertama masih menggunakan indikator kinerja pada periode tersebut masih menggunakan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) sebagai indikator yang merepresentasikan tingkat penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Indeks Reformasi Birokrasi, pengukuran kinerja melalui indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada Perangkat Daerah tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mekanisme sebelumnya. Capaian indikator *Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* mulai terukur secara konsisten sejak Tahun 2023. Pada tahun tersebut realisasi mencapai 60,46 poin dengan capaian 95,00%. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 64,92 poin dengan capaian 99,88%. Selanjutnya pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 65,96 poin dengan capaian sebesar 97,00%.

Peningkatan nilai SAKIP tersebut mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja program. Meskipun persentase capaian Tahun 2025 sedikit lebih rendah dibanding Tahun 2024, hal ini disebabkan adanya peningkatan target kinerja yang lebih tinggi. Secara substantif, kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah menunjukkan tren yang semakin baik.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah

Indikator Persentase Partisipasi Lembaga Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada Masyarakat menunjukkan capaian yang sangat optimal. Sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, realisasi dan capaian indikator secara konsisten mencapai 100,00%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga politik yang menjadi sasaran telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan politik yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol. Konsistensi capaian 100% mencerminkan efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pembinaan yang dilakukan, serta meningkatnya komitmen lembaga politik dalam mendukung pembangunan demokrasi yang berkualitas di Kota Balikpapan.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan

Indikator Persentase Konflik Sosial yang Tertangani menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target pada beberapa tahun. Pada Tahun 2022 realisasi mencapai 81,00% dengan capaian 101,00%. Tahun 2023 meningkat menjadi 85,00% dengan capaian 102,40%. Pada Tahun 2024 realisasi mencapai 100,00% dengan capaian 113,64%, dan pada Tahun 2025 tetap terjaga pada 100,00% dengan capaian 100,00%.

Data tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas deteksi dini, koordinasi lintas sektor, mediasi, serta penyelesaian konflik sosial secara komprehensif. Sejak Tahun 2024 hingga 2025 seluruh konflik sosial yang terjadi dapat ditangani dengan baik, sehingga mencerminkan stabilitas kondisi sosial yang kondusif di Kota Balikpapan.

Selanjutnya, subbab ini juga memuat analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Mengingat

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mulai berlaku pada Tahun 2025, maka tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun baseline bagi seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan dimaksud. Dengan demikian, belum tersedia data pembandingan capaian kinerja untuk periode sebelum Tahun 2025 yang disusun berdasarkan kerangka perencanaan yang sama. Adapun rincian realisasi dan capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) (Angka)	—	—	—	0,55	0,57	0,57	100,00%
	Meningkatnya Penyelesaian Potesnsi Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Telah Diselesaikan (%)	—	—	—	—	80,00	100,00	125,00%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	—	—	60,46	64,92	68,00	65,96	97,00%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dengan indikator yang digunakan adalah Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 penduduk). Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 0,57, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,57, dengan capaian 100,00%.

Capaian ini menunjukkan tingkat potensi konflik sosial berada dalam batas yang terkendali sesuai yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan data historis (2023 sebesar 60,46 dan 2024 sebesar 64,92 dalam format pengukuran sebelumnya), terlihat adanya perubahan pendekatan pengukuran indikator menjadi berbasis rasio per 10.000 penduduk.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas langkah deteksi dini, koordinasi lintas sektor, serta upaya preventif dalam menjaga kondusivitas wilayah Kota Balikpapan.

Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial Indikator Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Diselesaikan (%) menunjukkan hasil yang sangat optimal. Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,00%, sementara realisasi mencapai 100,00%, sehingga capaian mencapai 125,00%.

Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa seluruh potensi konflik sosial yang teridentifikasi pada Tahun 2025 berhasil diselesaikan. Hal ini mengindikasikan:

- 1) Respons cepat terhadap potensi gangguan ketertiban sosial;
- 2) Penguatan peran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait;
- 3) Optimalisasi peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Kinerja ini memperlihatkan kapasitas kelembagaan yang semakin kuat dalam manajemen konflik, baik secara preventif maupun kuratif.

Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 68,00, dengan realisasi sebesar 65,96, sehingga capaian mencapai 97,00%.

Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian 97% menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik. Selisih terhadap target dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada aspek:

- 1) Penyelarasan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- 2) Penguatan cascading kinerja hingga level individu;
- 3) Peningkatan kualitas evaluasi internal dan tindak lanjut rekomendasi

Secara umum, nilai tersebut tetap menunjukkan kategori kinerja yang baik dan konsisten dengan tren peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sesuai analisis pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dengan perbandingan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama periode perencanaan, sekaligus memberikan gambaran kecenderungan kinerja Perangkat Daerah terhadap target jangka menengah yang telah direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026/ Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	2025			Target Akhir Renstr a 2026/2 029*	Capai an Terha dap Akhir Renst ra (%)
				Targ et Rens tra	Realis asi	Capai an		
1	2	3	4	5	6	7=6/5* 100	8	9 =6/8*1 00
	Meningkat nya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) (Angka)	Angk a	0,57	0,57	100%	0,55	96%
	Meningkat nya	Persentase Potensi	%	80,00	100,0 0	125%	89	112%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	2025			Target Akhir Renstra 2026/2 029*	Capai an Terha dap Akhir Renst ra (%)
				Targ et Rens tra	Realis asi	Capai an		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
	Penyelesai an Potesnsi Konflik Sosial	Konflik Sosial Yang Telah Diselesaika n						
	Meningkat nya Kualitas Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,00	65,56	96%	70,1	94%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel perbandingan antara Target Renstra Tahun 2025, Realisasi Tahun 2025, serta Target Akhir Renstra 2026–2029, dapat disampaikan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan capaian yang baik dan progres yang positif menuju target akhir periode perencanaan.

Sasaran 1 Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dengan Indikator Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,57 dan terealisasi sebesar 0,57, sehingga capaian terhadap target tahunan mencapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 0,55, maka capaian terhadap akhir Renstra mencapai 96%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Tahun 2025 sudah sangat mendekati kondisi ideal yang ditetapkan pada akhir periode Renstra.

Dengan selisih yang relatif kecil (0,02 poin), upaya pengendalian dan pencegahan potensi konflik sosial dinilai telah berjalan efektif. Namun demikian, masih diperlukan penguatan langkah preventif, deteksi dini, serta

peningkatan sinergi lintas sektor agar angka potensi konflik dapat ditekan lebih rendah sesuai target akhir Renstra.

Sasaran 2 Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial dengan indikator Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Diselesaikan menunjukkan capaian yang sangat optimal. Target Tahun 2025 sebesar 80%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian mencapai 125%.

Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 89%, maka realisasi Tahun 2025 telah mencapai 112% terhadap target akhir Renstra. Hal ini berarti bahwa kinerja penyelesaian konflik sosial telah melampaui ekspektasi jangka menengah.

Capaian ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dalam penyelesaian konflik sosial telah berada di atas standar yang direncanakan. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga konsistensi kualitas penyelesaian konflik, termasuk memastikan keberlanjutan penyelesaian dan mencegah konflik berulang.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 68,00, dengan realisasi 65,56, sehingga capaian terhadap target tahunan sebesar 96%.

Apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 70,1, maka capaian terhadap akhir Renstra baru mencapai 94%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap yang perlu ditutup untuk mencapai target kinerja jangka menengah. Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan tren kinerja yang baik. Perlu dilakukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, penyelarasan indikator hingga level individu (cascading), peningkatan kualitas evaluasi internal, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berjalan dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (*benchmark kinerja*) untuk menilai posisi capaian kinerja melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolak ukur. Standar kinerja tersebut meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerja pada tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, serta standar internasional yang relevan.

Perbandingan ini untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta menilai sejauh mana capaian kinerja tersebut berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik (*best practices*) yang berlaku secara nasional dan internasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)/ Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)*

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi <i>Benchmark</i> Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Poin	65,96	70,06
	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam	Persen	100,00	n/a

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi <i>Benchmark</i> Kinerja
1	2	3	4	5	6
		pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat			
	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	100,00	n/a

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2025 realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan juga tidak dapat disandingkan dengan SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja), karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Adapun pada sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan indikator Nilai SAKIP, apabila membandingkan realisasi kinerja seluruh antar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Kalimantan Timur didapat data bahwa Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan 65,96 masih berada di bawah Kota Bontang dengan nilai 70,06.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Identifikasi dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021–2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 sebagai tahun masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis juga menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, serta sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan di Tahun 2025.



Tabel 3.10 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{7} \times 100$	8	9	10
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Poin	68,00	65,96	97%	Penyebab belum tercapainya target kinerja untuk nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1. Evaluasi internal belum optimal dalam menganalisis efektivitas dan efisiensi program; 2. Tindak lanjut	Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah : 1. Penyempurnaan pohon kinerja dan cascading indikator hingga level staf.; 2. Review dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja agar lebih fokus pada outcome;	Berikut rencana perbaikan/tindak lanjut untuk pencapaian target indikator sasaran ini pada periode selanjutnya: 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen nilai SAKIP yang rendah; 2. Meningkatkan kualitas LKJIP



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{7} \times 100$	8	9	10
							rekomendasi hasil evaluasi belum sepenuhnya terdokumentasi sistematis 3. Penyelarasan (cascading) kinerja belum sepenuhnya tajam hingga level individu.	3. Digitalisasi monitoring kinerja secara berkala (dashboard kinerja).	dengan analisis efektivitas program; 3. Monitoring triwulanan atas capaian kinerja dan tindak lanjut rekomendasi



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	Persentase	100,00	100,00	100%	Penyebab keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah : 1. Koordinasi aktif dengan partai politik; 2. Pengawasan penggunaan dana bantuan politik berjalan baik; 3. Kepatuhan partai politik terhadap regulasi	Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah : 1. Penilaian kualitas kegiatan pendidikan politik (indikator kualitatif); 2. Monitoring langsung pelaksanaan kegiatan; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik	Berikut rencana perbaikan/tindak lanjut untuk pencapaian target indikator sasaran ini pada periode selanjutnya: 1. Menyusun instrumen evaluasi kualitas pendidikan politik; 2. Mendorong inovasi metode sosialisasi (<i>digital outreach</i>, forum



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{7} \times 100$	8	9	10
							pendidikan politik 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan politik		dialog publik). 3. Meningkatkan sinergi dengan KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat.



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persentase	100,00	100,00	100%	Penyebab keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah: 1. Berfungsinya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; 2. Deteksi dini potensi konflik melalui koordinasi lintas sektor; 3. Respons cepat dalam memfasilitasi	Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah: 1. Penguatan <i>sistem early warning system</i> berbasis data; 2. Pemetaan potensi konflik berbasis wilayah; 3. Peningkatan literasi digital dan kontra narasi terhadap hoaks.	Berikut rencana perbaikan/tindak lanjut untuk pencapaian target indikator sasaran ini pada periode selanjutnya: 1. Pembaruan database potensi konflik secara berkala; 2. Pelatihan mediasi konflik bagi aparatur dan tokoh



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{7} \times 100$	8	9	10
							penyelesaian konflik.		masyarakat.

Sumber:
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Sesuai dengan tabel diatas, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang baik dengan sebagian besar indikator strategis mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat area yang memerlukan penguatan untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Pada sasaran peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian Nilai SAKIP sebesar 65,96 atau 97% dari target 68,00 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih perlunya penyempurnaan pada aspek penyelarasan kinerja (*cascading*), penguatan indikator berbasis outcome, serta optimalisasi evaluasi internal dan tindak lanjut rekomendasi hasil reviu. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja menjadi prioritas perbaikan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, pada sasaran peningkatan pembangunan demokrasi dan politik di daerah serta peningkatan pencegahan konflik sosial, seluruh indikator berhasil mencapai target 100%. Keberhasilan ini didukung oleh efektivitas koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran kelembagaan, serta komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program. Meskipun capaian telah optimal secara kuantitatif, tantangan ke depan adalah memastikan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta dampak substantif dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut, perangkat daerah akan melakukan langkah-langkah strategis berupa penyempurnaan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, penguatan evaluasi berbasis outcome, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem monitoring kinerja yang lebih terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga capaian pada bidang demokrasi dan penanganan konflik sosial, akan

dilakukan penguatan pendekatan preventif, peningkatan kualitas pendidikan politik, serta optimalisasi sistem deteksi dini konflik sosial. Dengan langkah perbaikan tersebut, diharapkan pada tahun mendatang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tidak hanya mampu mempertahankan capaian yang telah optimal, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja hingga mencapai target yang lebih tinggi sesuai arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk)	100,00%					
	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	100,00%	Meningkatnya Penyelesaian Potesnsi Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Telah Diselesaikan	125,00%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	66	100	152%



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional	100	104	104%
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100	195	195,00 %



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	100	100	100,00 %



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	89	100	112,36 %
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	100	100	100,00 %
	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangan i	100,00%				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi	95	100	105,26 %



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kota Balikpapan						SOSIAL, DAN BUDAYA	Konsep P4GN			
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	100	100	100,00 %
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	88	100	113,64 %
							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	100	100	100,00 %



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penanganan Konflik Sosial	Sosial yang terlaksana			
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97,00%	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	97,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	77	89,53 %
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	65	95,59 %
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81	78	96,30 %



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81	78	96,30 %
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81	77	95,06 %
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81	76	93,83 %



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82	78	95,12 %
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81	77	95,06 %

Keterangan:

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menuju Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.10 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada masa transisi Renstra disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 sebesar 65,96 menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik, meskipun belum mencapai target 68,00. Pada masa transisi Renstra, tantangan utama terletak pada penyesuaian indikator kinerja, penyelarasan dokumen perencanaan, serta peningkatan kualitas evaluasi berbasis outcome. Pencapaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam perencanaan berbasis kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih terstruktur. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi cascading indikator, penguatan analisis efektivitas program, serta optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal. Program yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola internal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, khususnya melalui kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Gambar 3.2 Rapat Rapat Internal Monitoring Capaian Kinerja



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

Gambar 3.3 Apel Rutin Pegawai



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

Namun demikian, perlu efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui:

- a. Integrasi sistem monitoring berbasis digital;
 - b. Penguatan reviu internal sebelum evaluasi eksternal;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen kinerja.
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah dengan indikator partisipasi lembaga politik dalam pendidikan politik mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan dalam memastikan seluruh partai politik melaksanakan kewajibannya. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif dan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan keuangan partai politik.

Meskipun capaian optimal, penguatan kualitas pendidikan politik masih menjadi perhatian agar dampak terhadap peningkatan literasi politik masyarakat dapat terukur secara lebih substansial.

Program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja ini adalah:

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Melalui program ini penguatan wawasan kebangsaan dan stabilitas demokrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Program berjalan efektif dalam menjaga partisipasi dan kondusivitas politik. Selanjutnya akan dilakukan inovasi metode pelaksanaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital dan dinamika generasi muda.

Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Bela Negara



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik

Program ini berkontribusi langsung terhadap indikator partisipasi lembaga politik. Realisasi kegiatan menunjukkan kepatuhan administratif dan partisipasi penuh seluruh partai politik penerima bantuan keuangan telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik sesuai ketentuan regulasi dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu.

Gambar 3.5 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

3. Sasaran Ketiga yaitu Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan

Persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh potensi konflik yang teridentifikasi dapat diselesaikan secara efektif. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini serta koordinasi lintas sektor yang berjalan baik.

Program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran ini adalah :

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Program ini menjadi program yang berkontribusi langsung dalam pencapaian pencapaian indikator, melalui kegiatan:
 - a) Monitoring situasi dan kondisi sosial;
 - b) Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c) Mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik.

Kontribusi program sangat signifikan terhadap stabilitas daerah. Ke depan, penguatan berbasis data dan pemetaan risiko menjadi kebutuhan strategis.

Gambar 3.6 Bimtek Kewaspadaan Dini

Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

Gambar 3.7 Monitoring Kondusifitas Daerah



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

Gambar 3.8 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

2) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini mendukung stabilitas sosial melalui pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat. Sinergi yang baik antara pemerintah dan ormas turut memperkecil potensi konflik horizontal.

Gambar 3.9 Pembinaan Ormas



Sumber : Dokumentasi Badan Kesbangpol, 2025

3.2.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan hanya didukung oleh sebanyak 31 orang. Terbagi atas ASN sebanyak 20 orang, PPPK sebanyak 7 Orang dan Naban sebanyak 4 orang.

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaa Sumber Daya Aparatur

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2025	16	15	31

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut:



Tabel 3.13 Pegawai ASN dan Non ASN berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Golongan				Sub Total	Pendidikan						Sub Total	Jenis Kelamin	
	IV	III	II	I		S-2	S-1/D-4	D3	SMA	SMP	SD		L	P
Kepala Badan	1				1	1						1	1	
Sekretaris Badan	1				1	1						1	1	
Kepala Bidang		2			2	2						2	1	1
Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian	1	4			5	1	3	1				5	3	2
Pelaksana		8	3		11		4	2	5			11	6	5
PPPK					7		1	1	4	1		7	3	4
Jumlah PNS/PPPK	3	14	3	0	27	5	8	4	9	1		27		
Non PNS					4		2		2			4	1	3
Total SDM PNS/PPPK+ Non PNS	31													

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi Pendidikan S-1 dan SMA. pegawai dengan pendidikan minimal S-1 berjumlah 13 orang (41,94%). Ini menunjukkan kapasitas akademik cukup memadai, SMA (29,03%) menunjukkan bahwa sebagian pelaksana masih berada pada level pendidikan menengah, dan S-2 sebesar 16,13% pada level struktural.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan pembagian tugas lintas



bidang/penambahan beban tugas terhadap personil yang ada serta melakukan pengusulan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan

jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kode Rekening	Uraian	2025
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	57.537.900
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	19.858.000
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	1.980.000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	42.093.000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	20.270.000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	1.400.000
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	130.000.000
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	15.000.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa	4.440.000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.035.200.000
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	170.900.000
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	294.341.244
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	4.950.000
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.887.000
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	13.800.630
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	2.289.500
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	92.500.000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	101.560.500
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	160.101.250
1.3.02.05.02.0001	Mebel	332.626.325
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4.620.000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	129.029.990
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.553.000
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	432.328.047
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	16.850.000
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	8.856.750

Kode Rekening	Uraian	2025
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	38.115.000
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.100.000
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	41.991.125
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	42.630.375
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	1.558.280.700
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	112.060.000
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	8.300.000
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	4.840.000
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	24.935.000
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	11.550.000
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	54.175.000
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	1.500.000
1.3.02.08.04.0004	Recorder Display	16.335.000
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	40.350.000
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	917.432.060
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	6.380.000
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	243.711.519
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	5.850.000
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	17.900.000
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	781.104.323
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	32.500.000
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	229.316.904
1.3.03.04.01.0004	Pagar	49.395.000
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	5.000.000
1.5.03.01.01.0005	Software	665.765.000
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	446.787.590
TOTAL ASET		8.457.277.732

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 214/PMK,02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pengukuran Efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian Keluaran I (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran I (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran I (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	Persen	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2021-2026	100,00	100,00	100,00%	13.029.581.427	11.896.605.685	91,30%	8,70%	Efisien
	Meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	Persen	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2021-2026	100,00	100,00	100,00%	8.211.383.915	7.161.200.446	87,21%	12,79%	Efisien



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 Penduduk) (Angka)	Angka	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025 2029	0,57	0,57	100,00%	30.909.230.510	26.996.712.123	87,34%	12,66%	Efisien
	Meningkatnya Penyelesaian Potesnsi Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial Yang Telah Diselesaikan	%	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025 2029	80,00	100,00	125,00%	9.058.715.595	7.918.810.672	87,42%	30,07%	Efisien

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bawah terdapat dua indikator kinerja] yang bersumber dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat dua indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator-indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
- 3) Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada Tahun 2025 mencapai sebesar 92,13% dari total anggaran yang dialokasikan, Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.668.265.168	7.938.905.992	82,11%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.990.000	9.768.000	97,78%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.990.000	9.768.000	97,78%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.640.380.196	4.915.685.816	87,15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.640.380.196	4.915.685.816	87,15%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.444.000	45.688.710	98,37%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46.444.000	45.688.710	98,37%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.574.366	969.912.444	74,12%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.960.751	240.195.675	94,95%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	568.399.330	332.141.946	58,43%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.543.885	97.532.000	89,85%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.538.500	8.400.000	66,99%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.131.900	54.538.000	83,73%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.000.000	237.104.823	78,77%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.000.000	141.035.999	90,41%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.000.000	141.035.999	90,41%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.135.596	948.067.550	78,93%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.164.896	119.535.308	41,05%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.970.700	828.532.242	91,05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.305.741.010	908.747.472	69,60%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	565.889.150	288.512.757	50,98%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	365.256.860	251.606.350	68,88%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.993.000	74.355.315	97,84%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	298.602.000	294.273.051	98,55%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.168.415.032	6.593.232.632	91,98%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.168.415.032	6.593.232.632	91,98%
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24.790.000	6.907.500	27,86%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	786.511.500	776.812.118	98,77%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.290.568.676	1.059.055.290	82,06%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	185.120.000	164.844.285	89,05%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.318.600.000	1.298.193.000	98,45%
	Pembentukan Paskibraka	3.063.952.856	2.834.383.059	92,51%
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	498.872.000	453.037.380	90,81%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.013.834.715	4.545.762.827	90,66%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.013.834.715	4.545.762.827	90,66%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.109.258	17.637.450	70,24%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.948.727.482	2.592.594.298	87,92%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	463.055.440	441.789.400	95,41%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	214.195.750	195.358.605	91,21%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.362.746.785	1.298.383.074	95,28%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	847.331.680	757.610.226	89,41%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	847.331.680	757.610.226	89,41%
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14.800.000	11.050.000	74,66%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	214.800.000	213.300.000	99,30%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	252.829.760	210.864.300	83,40%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	177.218.720	154.550.866	87,21%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	187.683.200	167.845.060	89,43%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.097.456.690	1.691.164.523	80,63%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.097.456.690	1.691.164.523	80,63%
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	21.876.000	5.235.000	23,93%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	938.270.850	818.184.822	87,20%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	216.776.740	149.868.701	69,14%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	556.300.000	526.806.000	94,70%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	364.233.100	191.070.000	52,46%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.113.927.225	5.470.035.923	89,47%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6.113.927.225	5.470.035.923	89,47%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50.000.000	44.441.248	88,88%
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.574.811.875	2.493.887.129	96,86%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.061.355.350	938.956.121	88,47%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	264.260.000	214.641.600	81,22%



No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	349.500.000	255.803.300	73,19%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.814.000.000	1.522.306.525	83,92%
	Total	30.909.230.510	26.996.712.123	87,34%

Sumber: Data SIPERANGKO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV PERENCANAAN KINERJA

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu *pelaksanaan Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Tahun anggaran 2025 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja nilai SAKIP memiliki capaian kinerja 97%. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas perangkat daerah berada pada kategori **baik** walaupun dengan predikat capaian sasaran **Tidak Tercapai**.
2. Sasaran 2 Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah dengan indikator Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dengan realisasi capaian Indikator mencapai **100 %** atau predikat “**Sesuai Target**”.
3. **Sasaran ketiga** dengan indikator yang digunakan adalah Persentase Konflik Sosial yang Tertangani menunjukkan capaian 100% dengan predikat **Sesuai Target**, yang menggambarkan bahwa seluruh konflik

sosial yang terjadi selama Tahun 2025 dapat ditangani secara cepat dan tepat

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan yaitu Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dengan indikator yang digunakan adalah Angka Potensi Konflik Sosial (per 10.000 penduduk). Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 0,57, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,57, dengan capaian 100,00% dengan predikat capaian **Tercapai/Sesuai Target**;
2. **Sasaran 2** Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial dengan indikator Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Diselesaikan menunjukkan capaian yang sangat optimal. Target Tahun 2025 sebesar 80%, dengan realisasi 100%, sehingga capaian mencapai 125% dengan predikat Capaian **Melebihi Target**.
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 68,00, dengan realisasi sebesar 65,96, sehingga capaian mencapai 97,00% dengan predikat **Tidak Tercapai**.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai upaya mempertahankan capaian yang telah melampaui target serta memperbaiki sasaran yang belum optimal, disampaikan beberapa saran dan rencana tindak lanjut kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sebagai berikut:



1. Perlu meningkatkan kualitas evaluasi internal dalam perangkat daerah agar implementasi kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai target-target yang menjadi sasaran strategis;
2. Memperkuat pendekatan *money follows program* agar penganggaran lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap outcome dengan penyesuaian pada target kinerja yang telah terlampaui;
3. Memperkuat dokumentasi dan pelaporan berbasis eviden dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program tahun berikutnya
4. Menyusun instrumen evaluasi kualitas pendidikan politik dan efektivitas pembinaan Masyarakat;
5. Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas;
6. Memperkuat sistem deteksi dini berbasis pemetaan potensi konflik;
7. Mempertahankan koordinasi lintas sektor yang sudah terjalin baik dan peran masyarakat dalam mitigasi konflik.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan Tahun 2025, semoga dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang penting dalam memahami peran, tugas dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tahun berikutnya.

Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota

Balikpapan



SUTADI